

**PERAN PENYAJIAN DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN, SISTEM  
PENGENDALIAN INTERNAL PADA PENINGKATAN AKUNTABILITAS  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Yelfa Fauziyyah<sup>1</sup>, Ria Nelly Sari<sup>2</sup>, Lila Anggraini<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

<sup>1</sup>yelfafauziyyah17@gmail.com, <sup>2</sup>ria.nellysari@lecturer.unri.ac.id

<sup>3</sup>lilaanggraini@lecturer.unri.ac.id

**ABSTRACT**

*This research aims to analyze the factors that have an impact on the accountability of Regional Financial Management, which consists of Presentation of Financial Reports, Accessibility of Financial Reports and Internal Control Systems for Accountability of Regional Financial Management. This research is quantitative research. The population in this study was OPD in Kuantan Singingi Regency. The sample in this research was 22 OPDs in Kuantan Singingi Regency using the saturation sampling method. The type of data used in this research is primary data. The data collection technique used a questionnaire with a total of 66 respondents. The results of data analysis using SmartPLS 4.0 show that the presentation of financial reports, the accessibility of financial reports and the internal control system influence the accountability of regional financial management. It is hoped that this research can contribute to increasing accountability in regional financial management in OPDs in Kuantan Singingi district.*

*Keywords: Accountability, Presentation, Accessibility*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berdampak terhadap akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah OPD yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Sampel dalam penelitian ini adalah 22 OPD di Kabupaten Kuantan Singingi dengan menggunakan metode sampling jenuh. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan jumlah responden 66 orang. Hasil analisis data menggunakan SmartPLS 4.0 menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada OPD di Kabupaten Kuantan Singingi.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Aksesibilitas, Sistem Pengendalian Internal

**A. Pendahuluan**

Di era reformasi yang terjadi di Indonesia saat ini, masyarakat

menuntut agar pemerintah mampu mengelola otonomi daerah dan sistem pengelolaan keuangan daerah

dengan lebih baik. Hal ini disebabkan karena asas otonomi daerah membuat masyarakat meningkatkan tuntutan mereka terhadap pemerintah untuk melaksanakan pemerintahan yang baik, sehingga tuntutan ini mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara baik di pusat maupun daerah.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah mengacu pada kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola dana publik yang diperoleh melalui pendapatan daerah serta dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat. Semakin baik laporan keuangan pemerintah daerah maka akan semakin meningkat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan serangkaian proses dalam pengelolaan keuangan daerah mulai dari merencanakan, melaksanakan, mempertanggungjawabkan, serta mengawasi kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan atas program dan kebijakan pemerintah daerah untuk dilaporkan kepada DPRD dan masyarakat secara jujur dan sesuai

dengan kebijakan hukum (Mudjiyono, 2019).

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan berupa laporan keuangan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Hal ini bertujuan agar setiap anggaran tidak dapat disalahgunakan dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena keuangan daerah yang tidak akuntabel dapat mengarah pada penyalahgunaan dana publik, korupsi, dan ketidakseimbangan fiskal yang merugikan masyarakat. Beberapa masalah yang sering terjadi adalah kelemahan dalam sistem pelaporan keuangan dan rendahnya pertanggungjawaban para pejabat daerah terkait dengan pengelolaan keuangan. Hal ini telah menyebabkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah daerah dan berdampak negatif pada pembangunan lokal serta pelayanan publik yang buruk.

Terdapat banyak kasus penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan daerah yang melibatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan

kebocoran dana dan penyelewengan. Dilihat dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada tahun 2022 bahwa Kabupaten Kuantan Singingi kembali menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Perwakilan Riau. Tanpa bermaksud mengurangi pencapaian yang telah diterima oleh pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan laporan tersebut ditemukan adanya masalah pada sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap perundang-undangan. Salah satunya pengelolaan barang milik daerah belum memadai sehingga data barang milik daerah dalam KIB belum sepenuhnya akurat dan informatif, disamping itu terdapat potensi kehilangan barang milik daerah yang dikuasai oleh pihak yang tidak berhak. Hal lain yang menjadi catatan BPK mengenai pendataan, penagihan, dan pengawasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan belum memadai, sehingga pemerintah kabupaten kuantan singingi kesulitan dalam menagih piutang PBB-P2. (Sumber : [riau.bpk.go.id](http://riau.bpk.go.id)).

Selain masalah yang disebutkan di atas, terdapat juga kasus lain yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi terkait korupsi anggaran proyek lintasan atletik stadion utama sport center pada Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga. Proses pembuatan stadion utama tersebut dikerjakan oleh PT Ramawijaya dengan nilai kontrak sebesar Rp8.579.579.000 dimana sumber dana adalah APBD kuantan singingi tahun anggaran (TA) 2020. Dalam proses pelaksanaannya, ditemukan berbagai permasalahan sehingga pihak kejaksaan melakukan penelusuran, pengumpulan data dan keterangan dari beberapa pihak yang terkait dengan proyek tersebut. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti, jaksa menetapkan terdapat tiga orang tersangka karena Penyidik Kejari Kuantan Singingi telah memiliki 2 alat bukti yang cukup berdasarkan pasal 184 ayat 1 KUHAP. Untuk mempercepat proses penyidikan dilakukan penahanan terhadap ketiga tersangka tersebut. Berdasarkan Laporan Hasil Audit dapat disimpulkan telah terjadi kerugian pada proyek tersebut, terdapat selisih pembayaran yang mengakibatkan

kerugian keuangan daerah senilai Rp1.041.946.877,73. (Sumber : goriau.com).

Dari kasus di atas menunjukkan kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk memajukan pembangunan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat telah disalahgunakan. Kurangnya akuntabilitas dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dalam menjaga integritas untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan aksesibilitas dan pengendalian dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Pemerintah daerah perlu memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, tidak hanya kepada lembaga legislatif dan badan pengawasan tetapi juga kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dana publik (Kurniawan, 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh

penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

## **REVIEW LITERATUR DAN HIPOTESIS**

### **Teori Stewardship**

Teori *stewardship* menggambarkan situasi dimana para manajemen tidak termotivasi untuk tujuan-tujuan personal atau individu melainkan lebih ditujukan kepada sasaran hasil utama mereka sebagai kepentingan organisasi (Donaldson dan Davis, 1991). Teori *stewardship* pada hakikatnya mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, dapat dipercaya, mempunyai integritas tinggi dan memiliki kejujuran. Dalam teori ini manajemen dipandang sebagai pihak yang mampu melaksanakan tindakan yang sebaik-baiknya dan dalam hal aksesibilitas untuk memudahkan stakeholders dalam mengakses informasi dengan tujuan memenuhi kebutuhan stakeholders (Harahap, 2015).

### **Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan

pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasarannya adalah laporan keuangan yang mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan instansi pemerintah daerah.

Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, melaporkan, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (prinsipal) baik yang berhasil maupun tidak, melalui sarana pelaporan yang dilakukan secara rutin. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa hasil yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan (Mardiasmo, 2017).

### **Penyajian Laporan Keuangan**

Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi yang akan mewujudkan akuntabilitas, sehingga pemerintah daerah diharapkan mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi

karakteristik laporan keuangan karena semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan disajikan dengan lengkap dalam laporan keuangan pemerintah daerah (Nordiawan dan Hertianti, 2010).

Penyajian laporan keuangan akan memberikan informasi tentang aktivitas masa lalu dan dapat digunakan untuk memprediksi masa yang akan datang. Informasi laporan keuangan harus bisa dibandingkan dengan periode sebelumnya, apabila dilakukan pemeriksaan oleh pihak yang berbeda yaitu pihak internal dan pihak eksternal maka diharapkan dapat memberikan simpulan yang tidak jauh berbeda.

### **Aksesibilitas Laporan Keuangan**

Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan dan ketersediaan informasi keuangan yang diberikan oleh suatu entitas kepada para pemangku kepentingan atau stakeholders. Keberhasilan aksesibilitas laporan keuangan akan meningkatkan tingkat kepercayaan dari pihak yang berkepentingan terhadap entitas tersebut, serta mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih baik dan informasi yang lebih tepat waktu bagi

para pemangku kepentingan. Masyarakat pengguna pelayanan publik membutuhkan informasi atas biaya, harga dan kualitas pelayanan yang diberikan (Mardiasmo, 2009).

### **Sistem Pengendalian Internal**

Sistem pengendalian internal adalah suatu rangkaian kegiatan yang terus menerus dilakukan oleh pimpinan serta karyawan agar dapat menjamin keandalan laporan keuangan serta dapat mengontrol dan memantau kinerja operasi pemerintah sehingga dapat menghasilkan kegiatan yang efektif dan efisien. Dengan adanya sistem pengendalian intern akan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan karna dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik dan transparan.

### **Pengembangan Hipotesis**

#### **Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Penyajian laporan keuangan daerah merupakan faktor penting untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan memenuhi

karakteristik laporan keuangan. Penyajian informasi yang lengkap dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan akan mewujudkan akuntabilitas (Nordiawan, 2010).

Teori stewardship menjelaskan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah baik pusat maupun daerah berupa laporan keuangan daerah kepada pengguna laporan pemerintah. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Sebagaimana bahwa teori stewardship ini lebih termotivasi pada tujuan organisasi, diperlukan penyajian laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat mencapai tujuan organisasi. Semakin baik penyajian laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maka pelaporan keuangan pemerintah daerah akan semakin jelas karena semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan disajikan dengan lengkap dan jujur dalam laporan keuangan

pemerintah daerah. Untuk itu penyajian laporan keuangan diperlukan untuk menyajikan informasi yang jelas dan akurat, sehingga tercipta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik. Hal ini dapat membantu Organisasi Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan secara efektif dan membangun kepercayaan publik.

H<sub>1</sub> : Penyajian Laporan Keuangan Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

### **Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Menurut (Rohman, 2009) yang menyatakan bahwa laporan keuangan harus dapat dimengerti dan tersedia bagi mereka yang tertarik dan mau berusaha untuk memahaminya. Pemerintah daerah harus mampu memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, tidak hanya kepada lembaga legislatif dan badan pengawasan tetapi juga kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dana publik. Agar pemerintah dapat menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang

baik maka pemerintah daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat secara terbuka dengan mengembangkan sistem informasi keuangan daerah.

Hasil tersebut mendukung teori stewardship yang menyatakan bahwa pemerintah daerah sebagai steward memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, dan publik dapat mengontrol pertanggungjawaban penggunaan aset daerah dan kebijakan keuangan yang diambil oleh pemerintah daerah. Dengan adanya kemudahan akses dapat memudahkan tercapainya tujuan organisasi sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

H<sub>2</sub> : Aksesibilitas Laporan Keuangan Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

### **Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Penerapan pengendalian internal yang baik akan memberikan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, sistem pengendalian internal yang baik tentu tidak akan berguna jika tidak didukung dengan sumber

daya manusia yang kompeten (Santika, 2021). Pengendalian internal didirikan sebagai alat komunikasi yang dipengaruhi oleh sistem kemajuan sumber daya manusia dan informasi yang direncanakan untuk membantu hubungan dalam mencapai tujuan (Kartika, 2015).

Akuntabilitas dapat terwujud apabila setiap instansi menerapkan sistem pengendalian internal yang tepat karena dalam pengendalian internal suatu instansi pemerintahan harus menyajikan dan menyampaikan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Teori *stewardship* menjelaskan bahwa pemerintah daerah harus memberikan tanggungjawab yang baik untuk melakukan pengendalian yang efektif agar tercapainya tujuan organisasi atas pengelolaan sumber daya daerah. Pertanggungjawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan.

H<sub>3</sub> : Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

## **B. Metode Penelitian**

### **Populasi dan Sampel**

Menurut (sugiyono, 2014) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini adalah OPD di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu 22 OPD.

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *nonprobability sampling* atau dikenal dengan istilah sensus, yang artinya seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Oleh karena itu, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sama dengan populasi yaitu 22 OPD di Kabupaten Kuantan Singingi.

### **Jenis Dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data penelitian yang berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji perhitungan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan (Sugiyono, 2018). Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah sumber



data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2018).

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kuisisioner. Skala pengukuran variabel pada penelitian ini menggunakan skala likert. Skala likert adalah penentuan tingkat dan pengelompokan berdasarkan kategori tertentu, sekaligus mengukur besarnya perbedaan persepsi seseorang (Sekaran, 2011). Responden dapat memberikan jawaban sesuai dengan fakta yang dialami. Jawaban setiap pertanyaan dapat dipilih sesuai dengan skala nilai pengukuran 5 poin yaitu (1) sangat tidak setuju, (2) Tidak setuju, (3) Kurang setuju, (2) setuju dan (1) sangat setuju, seperti yang terlihat pada tabel 1 sebagai berikut :

**Tabel 1 Skala Pengukuran Variabel**

Pilihan Jawaban Responden	Skala Pengukuran
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Kurang Setuju (KS)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

### **Teknik Analisis Data**

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model

Structural Equation Modeling (SEM) atau Model Persamaan Struktural dengan program smart PLS 4.0. PLS-SEM adalah metode untuk menguji secara simultan hubungan antar konstruk laten dalam hubungan linier ataupun nonlinear dengan banyak indikator baik berbentuk mode A (refleksif) atau mode B (formatif) (Ghozali, 2018).

### **C.Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Penelitian ini bersifat kuantitatif dimana data yang dihasilkan akan berbentuk angka. Program aplikasi yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengolah data yang telah diperoleh adalah SmartPLS 4.0. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner yang disebar secara langsung oleh penulis kepada responden. Responden dalam penelitian ini merupakan Kepala Dinas/Badan, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Staff Pegawai Bagian Keuangan.

**Tabel 2 Distribusi Sebaran Kuesioner**

Kuesioner	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	66	100%
Kuesioner yang tidak kembali	0	0
Kuesioner yang dapat diolah	66	100%

Sumber : Data primer diolah, 2024

Kuesioner yang disebar dapat kembali seutuhnya karena penulis menyebarkan secara langsung ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kuantan Singingi, sehingga OPD dapat langsung memproses kuesioner yang diberikan. Jika sudah di proses dan kuesioner sudah disetujui oleh Kepala Dinas/Badan, maka responden dapat langsung mengisi kuesioner penelitian.

### Karakteristik Responden

Karakteristik responden digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai data demografi responden (jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir dan masa jabatan). Berikut ini disajikan secara lebih rinci statistik demografi responden :

**Tabel 3 Karakteristik Responden  
Berdasarkan Jenis Kelamin**

Keterangan	Jumlah	Persentase
Laki – laki	28	42,4%
Perempuan	38	57,6%

Sumber : Data primer diolah, 2024

Tabel 3 menunjukkan bahwa pejabat/aparatur di OPD Kabupaten Kuantan Singingi yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah paling banyak berjenis kelamin perempuan sebanyak 38 orang (57,6%) dan

berjenis kelamin laki – laki sebanyak 28 orang (42,4%).

**Tabel 4 Karakteristik Responden  
Berdasarkan Usia**

Keterangan	Jumlah	Persentase
<30 tahun	9	13,6%
31-40 tahun	27	41%
41-50 tahun	22	33,3%
>50 tahun	8	12,1%

Sumber : Data primer diolah, 2024

Tabel 4 menunjukkan bahwa data umur pejabat/aparatur di OPD Kabupaten Kuantan Singingi yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah yang berhasil terkumpul dikelompokkan kedalam 4 kelompok umur yaitu yang paling banyak pejabat/aparatur pengelolaan keuangan daerah yang berumur 31-40 tahun sebanyak 27 orang (41%), yang berumur 41-50 sebanyak 22 orang (33,3%), yang berumur <30 tahun sebanyak 9 orang (13,6%), dan yang berumur >50 tahun sebanyak 8 orang (12,1%).

**Tabel 5 Karakteristik Responden  
Berdasarkan Pendidikan**

Keterangan	Jumlah	Persentase
SMA	0	0
D3	9	13,6%
S1	29	43,9%
S2	23	34,9%
S3	5	7,58%

Sumber : Data primer diolah, 2024

Tabel 5 menunjukkan bahwa pejabat/aparatur pada OPD Kabupaten Kuantan Singingi memiliki

tingkat pendidikan S1 sebanyak 29 orang (43,9%), S2 sebanyak 23 orang (34,9%), D3 sebanyak 9 orang (13,6%) dan S3 sebanyak 5 orang (7,58%).

**Tabel 6 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Jabatan**

Keterangan	Jumlah	Persentase
1-5 tahun	28	42,5%
6-10 tahun	26	39,3%
>10 tahun	12	18,2%

Sumber : Data primer diolah, 2024

Tabel 6 menunjukkan bahwa pejabat/aparatur pada OPD Kabupaten Kuantan Singingi memiliki masa jabatan 1-5 tahun sebanyak 28 orang (42,5%), yang menjabat selama 6-10 tahun sebanyak 26 orang (39,3%) dan yang menjabat >10 tahun sebanyak 12 orang (18,2%).

### Analisis Statistik Deskriptif

Deskripsi variabel digunakan untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Karakteristik responden digunakan dalam memberikan gambaran tentang responden yang menjadi subjek penelitian. Oleh karena itu, dilakukan perhitungan dengan menggunakan statistik deskriptif yang dimaksudkan untuk

menganalisis data berdasarkan atas hasil yang diperoleh dari jawaban responden terhadap masing-masing indikator pengukur variabel. Statistik deskriptif terdiri dari mean, minimum, maximum, dan standar deviasi.

Penyebaran kuesioner yang menghasilkan 66 jawaban responden dari setiap pernyataan kuesioner telah dilakukan uji deskriptif yang dilakukan pada 3 variabel X dan 1 Variabel Y.

**Tabel 7 Hasil Analisis Deskriptif Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Standar Deviasi
Y1	66	3	5	4,091	0,668
Y2	66	3	5	4,288	0,515
	66	3	5	4,121	0,564
Y3	66	2	5	4,136	0,694
Y4	66	3	5	4,212	0,591
Y5	66	3	5	4,288	0,515
Y6		Total		4,189	0,591

Sumber : Data Olahan Smart PLS 4.0, 2024

Tabel 7 menjelaskan bahwa seluruh pernyataan kuesioner variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dari Y1 sampai dengan Y6 memperoleh nilai minimum 2 yang berarti bahwa jawaban terendah dari responden adalah tidak setuju dan nilai maximum 5 yang artinya jawaban tertinggi dari responden adalah sangat setuju.

Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 4,189 mengindikasikan bahwa

sebagian besar responden mengisi pilihan sangat setuju pada butir pernyataan kuesioner variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dari nilai rata-rata tersebut, artinya rata-rata responden setuju bahwa sebagian besar OPD di Kabupaten Kuantan Singingi telah mampu mengelola keuangan dengan baik. Selain itu, responden juga setuju pada pernyataan terkait akuntabilitas kejujuran, akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas progra dan akuntabilitas kebijakan. Kemudian standar deviasi menunjukkan bahwa penyebaran data cukup baik dan stabil dikarenakan nilai standar deviasinya lebih kecil daripada nilai rata-rata (*mean*).

**Tabel 8 Hasil Analisis Deskriptif Penyajian Laporan Keuangan (X1)**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Standar Deviasi
X1.1	66	4	5	4,333	0,471
X1.2	66	3	5	4,348	0,507
	66	4	5	4,364	0,481
X1.3	66	4	5	4,348	0,476
X1.4		Total		4,348	0,483

Sumber : Data olahan Smart PLS 4.0, 2024

Tabel 8 menjelaskan bahwa nilai minimum variabel penyajian laporan keuangan memperoleh skor 3 yang artinya jawaban terendah dari responden adalah kurang setuju dan nilai maximum memperoleh skor 5

yang berarti bahwa jawaban tertinggi dari responden adalah sangat setuju.

Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 4,348 mengindikasikan bahwa sebagian besar responden mengisi pilihan setuju pada butir pernyataan kuesioner variabel penyajian laporan keuangan. Ini artinya rata-rata responden setuju bahwa sebagian besar OPD di Kabupaten Kuantan Singingi telah menyajikan laporan keuangan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari nilai rata-rata tersebut, menunjukkan bahwa Dinas/Badan telah memiliki kriteria yang sesuai dengan indikator penyajian laporan keuangan. Standar deviasi sebesar 0,483 menunjukkan bahwa penyebaran data cukup baik dan stabil karena nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai rata-rata (*mean*).

**Tabel 9 Hasil Analisis Deskriptif Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2)**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Standar Deviasi
X2.1	66	3	5	4,591	0,522
X2.2	66	4	5	4,515	0,500
	66	4	5	4,591	0,492
X2.3		Total		4,565	0,504

Sumber : Data olahan Smart PLS 4.0, 2024

Tabel 9 menjelaskan bahwa nilai minimum variabel aksesibilitas laporan keuangan memperoleh skor 3 yang berarti bahwa jawaban terendah

dari responden adalah kurang setuju dan nilai maximum memperoleh skor 5, artinya jawaban tertinggi dari responden adalah sangat setuju.

Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 4,565 mengindikasikan bahwa sebagian besar responden mengisi pilihan setuju pada butir pernyataan kuesioner variabel aksesibilitas laporan keuangan. Dari nilai rata-rata tersebut, menunjukkan bahwa OPD Kabupaten Kuantan Singingi telah memiliki kriteria yang sesuai dengan indikator aksesibilitas laporan keuangan. Standar deviasi sebesar 0,504 menunjukkan bahwa penyebaran data cukup baik karena nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai rata-rata (*mean*).

**Tabel 10 Hasil Analisis Deskriptif Sistem Pengendalian Internal (X3)**

	<b>N</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Mean</b>	<b>Standar Deviasi</b>
X3.1	66	3	5	4,182	0,423
X3.2	66	4	5	4,333	0,471
	66	4	5	4,303	0,460
X3.3	Total			4,272	0,451

Sumber : Data olahan Smart PLS 4.0, 2024

Tabel 10 menjelaskan bahwa nilai minimum variabel sistem pengendalian internal memperoleh skor 3 yang artinya jawaban terendah dari responden adalah kurang setuju dan nilai maximum variabel sistem

pengendalian internal memperoleh skor 5 yang berarti bahwa jawaban tertinggi dari responden adalah sangat setuju.

Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 4,272 mengindikasikan bahwa sebagian besar responden mengisi pilihan setuju pada butir pernyataan kuesioner variabel sistem pengendalian internal. Dari nilai rata-rata tersebut, menunjukkan bahwa OPD Kabupaten Kuantan Singingi telah memiliki kriteria yang sesuai dengan indikator sistem pengendalian internal. Standar deviasi sebesar 0,451 menunjukkan bahwa penyebaran data cukup baik karena nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai rata-rata (*mean*).

### **Model Pengukuran Atau Outer Model**

Pengukuran *outer model* diukur melalui *convergent validity, discriminant validity* dan *composite reliability* serta *cronbach's alpha*. *Convergent validity* dan *discriminant validity* digunakan untuk menguji validitas instrumen kuisisioner yang digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan, sedangkan *composite reliability* dan *cronbach's alpha* digunakan untuk menguji

reliabilitas dari instrumen kuesioner yang digunakan di dalam penelitian ini. Apabila ketiga kriteria tersebut telah terpenuhi, maka model pengukuran ini telah memenuhi kriteria dan dapat digunakan dalam penelitian.

### Uji Validitas

Uji validitas diukur melalui *convergent validity* dan *discriminant validity* digunakan untuk menguji validitas instrumen kuesioner yang digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

### Uji Convergent Validity

*Convergent validity* merupakan sejauh mana indikator-indikator dari variabel saling berbagi proporsi varians secara umum. Nilai *convergent validity* dihitung melalui nilai loading factor masing-masing indikator dan digunakan untuk menguji validitas konstruk. *Convergent validity* digunakan untuk melihat sejauh mana hasil pengukuran suatu konsep menunjukkan korelasi positif dengan hasil pengukuran konsep lain yang secara teoritis harus berkorelasi positif. Penelitian ini melakukan pengujian *outer loading* dan *Average Variance Extracted (AVE)* untuk

melihat *convergent validity*.

### Uji Outer Loading

*Outer loading* adalah tabel yang berisi loading factor untuk menunjukkan besar korelasi antara indikator dengan variabel laten. Nilai loading factor di atas 0,70 dinyatakan sebagai ukuran yang ideal atau valid sebagai indikator yang mengukur konstruk. Namun nilai loading factor 0,50 sampai 0,60 dianggap cukup memadai (Ghozali, 2018). Output *outer loading* diperoleh dari PLS Algorithm Report SmartPLS. Berikut nilai *outer loading* dari masing-masing indikator variabel penelitian :

**Tabel 11 Hasil Outer Loading**

Indikator	Penyajian Laporan Keuangan	Aksesibilitas Laporan Keuangan	Sistem Pengeandalan Internal	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
X1.1	0.900			
X1.2	0.927			
X1.3	0.920			
X1.4	0.933			
X2.1		0.728		
X2.2		0.835		
X2.3		0.922		
X3.1			0.802	
X3.2			0.850	
X3.3			0.804	
Y1				0.764
Y2				0.732
Y3				0.708
Y4				0.737
Y5				0.767

Y6

0.765

konstruk memiliki nilai >0.50. Oleh karena itu tidak ada permasalahan discriminant validity pada model yang diuji.

**Uji Discriminant Validity**

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengujian discriminant validity berdasarkan kriteria cross loading dan fornell-larcker criterion.

**Uji Cross Loading**

Nilai *cross loading* dari masing-masing konstruk variabel dapat dilihat pada tabel 13 berikut:

Sumber : Data Olahan Smart PLS 4.0, 2024

Tabel 11 menunjukkan bahwa hampir seluruh indikator variabel memiliki nilai *loading factor* yang lebih besar dari 0,70. Artinya semua indikator telah memenuhi syarat validitas konvergen.

**Nilai Average Variance Extracted (AVE)**

Pengujian *convergent validity* juga dapat dinilai berdasarkan *Average Variance Extracted (AVE)*. Nilai AVE dikatakan valid apabila memiliki nilai >0.50 (Ghozali, 2018). Hasil Average Variance Extracted (AVE) ditunjukkan pada pada tabel berikut:

**Tabel 12 Hasil Average Variance Extracted (AVE)**

Variabel	Average Variance Extracted (AVE)
Penyajian Laporan	0.846
Keuangan (X1)	0,692
Aksesibilitas Laporan	0,671
Keuangan (X2)	0,556
Sistem Pengendalian Internal (X3)	
Akunntabilitas	
Pengelolaan	
Keuangan Daerah (Y)	

Sumber: Data Olahan Smart PLS 4.0, 2024

Berdasarkan tabel 12, diketahui nilai AVE untuk semua

**Tabel 13 Hasil Cross Loading**

Indikator	Penyajian Laporan Keuangan	Aksesibilitas Laporan Keuangan	Sistem Pengendalian Internal	Akunntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
X1.1	<b>0.900</b>	0.099	0.145	0.281
X1.2	<b>0.927</b>	0.273	0.035	0.215
X1.3	<b>0.920</b>	0.148	0.018	0.225
X1.4	<b>0.933</b>	0.265	0.026	0.294
X2.1	0.109	<b>0.728</b>	0.051	0.116
X2.2	0.179	<b>0.835</b>	0.054	0.200
X2.3	0.213	<b>0.922</b>	0.052	0.283
X3.1	0.043	0.077	<b>0.802</b>	0.436
X3.2	0.037	0.087	<b>0.850</b>	0.473
X3.3	0.038	0.037	<b>0.804</b>	0.320
Y1	0.002	0.182	0.376	<b>0.764</b>
Y2	0.145	0.169	0.288	<b>0.732</b>
Y3	0.134	0.296	0.370	<b>0.708</b>
Y4	0.295	0.088	0.403	<b>0.737</b>
Y5	0.339	0.182	0.371	<b>0.767</b>
Y6	0.272	0.236	0.447	<b>0.765</b>

Sumber : Data Olahan Smart PLS 4.0, 2024

**Uji Fornell-Larcker Criterion**

Validitas diskriminan terpenuhi apabila akar kuadrat AVE (pada garis diagonal) lebih tinggi dibandingkan korelasi variabel lainnya (fornell dan Larcker, 1981).

**Tabel 14 Hasil Fornell-Larcker Criterion**

	Penyajian laporan keuangan	Aksesibilitas laporan keuangan	Sistem pengendalian internal	Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
X1	0.920			
X2	0.212	0.832		
X3	0.048	0.004	0.819	
Y	0.281	0.260	0.511	0.746

Sumber : Data Olahan Smart PLS 4.0, 2024

### Uji Reabilitas

Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan *coefficient cronbach's alpha* dan *composite reability*, yang merupakan teknik pengujian konsistensi reabilitas antar item yang paling populer dan merupakan indeks konsistensi reliabilitas yang cukup sempurna, semakin tinggi koefisien alpha, berarti semakin baik pengukuran suatu instrumen. Dari output ini, maka kriteria dilihat dari dua hal yaitu *compostie reability* dan *cronbach's alpha*. Nilai *compostie reability* dan *cronbach's alpha* yang nilainya >0,70 dapat dikatakan reliabel. (Sholohin dan Ratmono, 2013). Pendapat lain dinyatakan oleh Chin (2001) bahwa *cronbach's alpha* dalam PLS dikatakan baik apabila  $\geq 0,50$  dan dikatakan cukup apabila  $\geq 0,30$ . Apabila suatu konstruk telah memenuhi dua kriteria tersebut maka dapat dikatakan bahwa konstruk

reliabel atau memiliki konsistensi dalam instrumen penelitian.

**Tabel 15 Hasil Coefficient Cronbach's Alpha dan Composite Reability**

Variabel	Cronbach's Alpha	Compositte Reability	Keterangan
Penyajian Laporan Keuangan (X1)	0.940	0.954	Reliabel
Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2)	0.787	0.908	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal (X3)	0.758	0.774	Reliabel
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	0.842	0.847	Reliabel

Sumber: Data Olahan Smart PLS 4.0, 2024

Berdasarkan tabel 15 dapat disimpulkan bahwa masing-masing telah memenuhi kriteria reliabel dikarenakan nilai dari *cronbach's alpha* dan *composite reability* dari masing-masing variabel >0,70.

### Pengujian Struktural Model (*Inner Model*)

*Inner model* merupakan model struktural yang digunakan untuk memprediksi hubungan kausalitas (hubungan sebab-akibat) antar variabel laten atau variabel yang tidak dapat diukur secara langsung. Untuk meneliti struktural model dalam penelitian ini, penulis menggunakan



R-Square, Adjusted R-Squared, SRMR dan NFI. Hal ini untuk melihat dan meyakinkan hubungan antar konstruk adalah kuat.

**Nilai R-Square dan Adjusted R-Squared**

*R-Square* merupakan suatu nilai yang memperlihatkan seberapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Chin (1998) mengklasifikasikan tingkat R-Square sebagai kuat jika nilainya mencapai 0,67, moderat jika nilainya 0,33 dan lemah jika nilainya 0,19.

Sedangkan *Adjusted R-Squared* adalah nilai R Square yang telah dikoreksi berdasarkan nilai standar error. Nilai Adjusted R-Squared memberikan gambaran yang lebih kuat dibandingkan R-Square dalam menilai kemampuan sebuah konstruk exogen dalam menjelaskan konstruk endogen. Nilai Coefficient of Determination (R<sup>2</sup>) dan Adjusted R-Squared dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 16 Hasil R-Square dan Adjusted R-Squared**

Variabel	R-Square	Adjusted R-Square
Akuntabilitas pengelolaan	0.373	0.342

keuangan daerah (Y)

Sumber: Data Olahan Smart PLS 4.0, 2024

Berdasarkan tabel 16 diperoleh nilai R-Square untuk variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah sebesar 0.373, artinya variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 37,3% dipengaruhi oleh variabel penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan sistem pengendalian internal, sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

**Pengujian Hipotesis**

Uji hipotesis dimaksudkan untuk membuktikan kebenaran dugaan penelitian atau hipotesis. Pengujian ini dilakukan dengan cara analisis jalur (path analysis) atas model yang telah dibuat. Dalam metode PLS, pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis didasarkan pada nilai signifikansi (p-value) dan nilai t – tabel. Ambang batas signifikansi penelitian ini adalah 5%, dan batas nilai t – tabel untuk menolak dan menerima hipotesis yang diajukan adalah 1,96. Sehingga sebagai dasar pengambilan keputusan yaitu jika nilai p-value < 0,05 dan nilai t-statistik >

1,96, maka hipotesis diterima. Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 17 Hasil Uji Hipotesis**

	<b>Sampel asli</b>	<b>Rata-rata sampel</b>	<b>Standar deviasi</b>	<b>T-Statistik</b>	<b>P-Value</b>
Penyajian Laporan Keuangan -> Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	0,211	0,216	0,107	1,965	0,049
Aksesibilitas Laporan Keuangan -> Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	0,218	0,228	0,110	1,985	0,047
Sistem Pengendalian Internal -> Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	0,502	0,511	0,087	5,764	0,000

Sumber: Data Olahan Smart PLS 4.0, 2024

Hasil pengujian hipotesis pertama (H1) yaitu penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menunjukkan nilai koefisien 0,211 dengan nilai p-value 0,049 (<0,05) dan nilai t-statistik 1,965 (> 1,96). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H1 diterima.

Hasil pengujian hipotesis kedua (H2) yaitu aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, menunjukkan nilai koefisien 0,218

dengan nilai p-value 0,047 (<0,05) dan nilai t- statistik 1,985 (>1,96). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H2 diterima.

Hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) yaitu sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, menunjukkan nilai 0,502 dengan nilai p-value 0,000 (<0,05) dan nilai t- statistik 5,764 (>1,96). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H3 diterima.

### **Pembahasan Hasil Penelitian Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,211 dengan nilai p-value 0,049 (<0,05) dan nilai t-statistik 1,965 (>1,96). Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) diterima. Ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Artinya, dengan penyajian laporan keuangan yang baik, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat semakin meningkat.

Sebaliknya, jika penyajian laporan keuangan tidak baik maka akuntabilitas pengelolaan keuangan akan semakin menurun.

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan terhadap responden, dapat diketahui bahwa OPD Kabupaten Kuantan Singingi, dari segi pengetahuan sudah mampu memahami prosedur dalam mengelola keuangan serta memahami tugas pokok, fungsi dan uraian tugas. Responden juga memahami Peraturan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 13 tentang penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan yang di uji lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda memiliki hasil kesimpulan yang tidak berbeda jauh, artinya laporan keuangan ini sudah di uji keandalannya karena informasi yang disajikan harus akurat, lengkap, dan mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan. Ini mencakup penggunaan estimasi yang wajar dan pencatatan yang jelas terhadap transaksi dan peristiwa keuangan. Responden mengetahui bahwa Informasi laporan keuangan selalu dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya untuk memastikan informasi keuangan dapat digunakan

dengan efektif oleh para pengguna laporan keuangan.

Dengan diterimanya hipotesis ini membuktikan bahwa penyajian laporan keuangan merupakan faktor penting dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang baik. Hal ini sejalan dengan teori yang digunakan, yaitu teori stewardship (Donaldson dan Davis, 1991), yang menggambarkan situasi di mana para aparatur (manajer) tidak terdorong oleh tujuan individu mereka, melainkan lebih mengedepankan tujuan organisasi. penyajian laporan keuangan diperlukan untuk menyajikan informasi yang jelas dan akurat, sehingga tercipta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Hermanto dan Soni, 2019), (Artini dan Putra, 2020), (Mudjiyono, 2020), (Leatemala, 2021), (Purba et al., 2021), (Asmawanti et al., 2022), (Paramayana et al., 2022), Dan (Shandrina dan Hidajat, 2023) yang menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

### **Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Berdasarkan pengujian hipotesis, diperoleh hasil nilai koefisien sebesar 0.218 dengan nilai p-value 0.049 ( $< 0,05$ ) dan nilai t-statistik 1,985 ( $> 1,96$ ). Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus mampu memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, tidak hanya kepada lembaga legislatif dan badan pengawasan tetapi juga kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dana publik.

OPD di Kabupaten Kuantan Singingi mempublikasikan laporan keuangan dan hasil audit BPK pada website resmi pemerintah daerah yang merupakan bukti keterbukaan laporan keuangan, artinya laporan keuangan harus mengungkapkan informasi secara transparan mengenai kinerja keuangan termasuk pendapatan, biaya, laba, aset,

kewajiban, ekuitas, serta kebijakan akuntansi yang diterapkan. Informasi ini harus disajikan dengan cara yang jelas dan mudah dipahami. Responden mengetahui bahwa dengan ketersediaan informasi pada laporan keuangan yang tepat, jelas dan mudah diakses, Dinas/Badan dapat membangun kepercayaan yang lebih besar dari masyarakat dan mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih baik.

Dengan diterimanya hipotesis ini membuktikan bahwa aksesibilitas laporan keuangan merupakan faktor penting dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang baik. Penelitian ini juga sesuai dengan teori *stewardship*, agar pemerintah dapat menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang baik maka pemerintah daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat secara terbuka dengan mengembangkan sistem informasi keuangan daerah. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hermanto dan Soni, 2019), (Priscilla et al., 2022), (Zeny et al., 2023), (Defana dan Rahayu, 2023) mendukung hasil penelitian yang sama dengan penjelasan diatas,

bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

### **Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Berdasarkan pengujian hipotesis, diperoleh hasil nilai koefisien sebesar 0.502 dengan nilai p-value 0.000 ( $< 0,05$ ) dan nilai t-statistik 5,764 ( $> 1,96$ ). Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Menurut PP No. 60 tahun 2008, Sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang terintegrasi dalam tindakan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pimpinan dan seluruh karyawan dengan tujuan memberikan keyakinan terhadap pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, perlindungan aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan jawaban responden terhadap kuesioner yang

telah disebarakan, dapat dijelaskan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kuantan Singingi telah memiliki struktur organisasi yang tepat dan jelas sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari setiap bagian. Rencana pengelolaan untuk mengurangi risiko pelanggaran juga telah tersusun. Dalam kegiatan pengendalian, OPD Kuantan Singingi memiliki pegawai yang masing-masing memiliki fungsi berbeda terkait pencatatan, penghapusan, otorisasi, verifikasi, dan pembayaran transaksi. OPD Kabupaten Kuantan Singingi juga telah menerapkan pengaman aset untuk menghindari adanya fraud atau kesalahan yang disengaja. Responden memiliki rencana pengelolaan atau mengurangi risiko pelanggaran terhadap sistem dan prosedur akuntansi yang artinya dengan mengintegrasikan pengendalian risiko ke dalam sistem pengendalian internal, Dinas/Badan dapat meningkatkan kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi risiko-risiko yang dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi secara efektif. Hal ini juga membantu membangun kepercayaan dari berbagai pihak baik internal maupun

eksternal terhadap kemampuan OPD untuk mengelola risiko dengan baik.

Dengan diterimanya hipotesis ini membuktikan bahwa sistem pengendalian internal merupakan faktor penting dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan yang baik. Sesuai dengan teori yang digunakan, yaitu teori stewardship (Donaldson dan Davis, 1991), yang menjelaskan bahwa aparatur yang berfokus pada pemenuhan tujuan organisasi dan meningkatkan kinerja jangka panjang akan mempertimbangkan keputusan dengan memperhatikan faktor akuntabilitas. Dengan demikian, tindakan yang diambil akan lebih cermat dan terencana, mengarah pada peningkatan pengelolaan keuangan yang akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan. Teori stewardship menekankan bahwa para aparatur melihat tanggung jawab mereka sebagai pengelola Amanah. Oleh karena itu, mereka akan mencari cara untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan keandalan dalam pengelolaan keuangan. Hasil penelitian (Antika et al., 2020), (Purba et al., 2021), (Antika, 2023) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh

terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

## **E. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa untuk mengetahui apakah penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di OPD Kabupaten Kuantan Singingi. Hasil penelitian dari 66 responden dengan menggunakan SmartPLS 4.0 menyatakan bahwa keseluruhan item pengukuran pada pernyataan kuesioner telah dikonfirmasi valid dan reliabel, maka berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di OPD Kabupaten Kuantan Singingi.

## **Keterbatasan**

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah penelitian ini hanya dilakukan pada OPD di wilayah

Kabupaten Kuantan Singingi, sehingga tidak dapat digeneralisasi pada wilayah yang lebih luas. Penelitian ini memiliki nilai R-Square 0.373 atau dengan persentase sebesar 37,3%, yang artinya masih ada kemungkinan sekitar 62,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

### **Saran Untuk Penelitian Selanjutnya**

Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas wilayah penelitian, agar bisa menggambarkan keadaan akuntabilitas pengelolaan keuangan dengan lebih luas. Dan disarankan untuk menambahkan dan mengembangkan variabel penelitian yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah seperti transparansi, kualitas laporan keuangan dan lain sebagainya, sehingga dapat memberikan gambaran baru mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Mudjiyono, Y. I. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris

Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Bingkai Ekonomi*, 5(2), 16–26.

<https://stie-aka.ac.id/journal/index.php/jbe3/index>

Handayani, P. S. (2021). Pengaruh Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada DPKD Kota di Sumatera Barat). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(2), 364. <https://doi.org/10.33087/ekonomi.s.v5i2.339>

Mardiasmo. (2017). Akuntansi sektor publik, Yogyakarta: Penerbit ANDI

Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2010). Akuntansi Sektor Publik, Edisi Kedua. Penerbit: Salemba Empat.

Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

Abdul Rohman. (2009). Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah. Terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*.

Santika, N., Taufik, T., Savitri, D.,

- Akuntansi, P. S., & Riau, U. (2021). 479926769. 2(2), 319–338.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, penerbit Alfabeta, Bandung
- Zeny Antika, Yunika Murdayanti, & Hafifah Nasution. (2020). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Purba, M., Agusti, R., & Rofika, R. (2021). Penyajian Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Pada Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 2(3), 418–434. <https://doi.org/10.31258/jc.2.3.418-434>
- Artini, N. L. W., & Putra, I. P. D. S. (2020). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 188–218. <https://doi.org/10.32795/hak.v1i2.978>
- Defana, F. A., & Rahayu, S. (2023). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021). *Jurnal Ekombis Review*, 11(1), 21–30.
- Hermanto, S.-. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Kajian Akuntansi*, 20(2), 211–218. <https://doi.org/10.29313/ka.v20i2.4928>
- Priscilla, D., Taufik, T., & Riau, U. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Penerapan Pengendalian Internal Dan Penerapan Good



Governance Terhadap  
Akuntabilitas Pengelolaan  
Keuangan Daerah (Studi Empiris  
Pada Seluruh Opd Di Kabupaten  
Siak). *Bilancia: Jurnal Ilmiah  
Akuntansi*, 6(2), 180–190.  
[https://doi.org/10.35145/Bilanci  
a.V6i2.1317](https://doi.org/10.35145/Bilanci<br/>a.V6i2.1317)